

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Peran serta wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan cara patuh membayar pajak (Saputra dan Asyik, 2017). Besarnya peranan pajak pada jumlah penerimaan negara bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, seperti yang dimuat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2013-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015	2016
Penerimaan	Rp 1.077.306	Rp 1.146.865	Rp 1.240.418	Rp 1.539.166
Perpajakan				
Penerimaan Bukan Pajak	Rp 354.751	Rp 398.590	Rp 255.628	Rp 245.083
Jumlah	Rp 1.432.057	Rp 1.545.455	Rp 1.496.046	Rp 1.784.249

Sumber: www.bps.go.id (2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa peranan penerimaan perpajakan pada jumlah penerimaan negara sangat dominan dan merupakan pemasukan negara yang paling besar daripada penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2016, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.539.166 miliar meningkat 20 persen dari penerimaan perpajakan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.240.418 miliar. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah sangat bergantung pada penerimaan perpajakan sebagai sumber pendanaan bagi perekonomian. Oleh karena itu, bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011:1)

Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah (Suandy, 2011:1). Pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak selalu berupaya untuk meminimalkan beban pajak. Sebagai bentuk dari perlawanan atau penghindaran pajak wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil target pembayaran pajak agar pendapatan dan laba yang diinginkan tercapai. Sehingga banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit untuk menghindari beban pajak yang tinggi (Rezika, 2017).

Salah satu wajib pajak adalah perusahaan. Dari laba yang diperoleh perusahaan dapat diketahui seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. Hal

ini menjadi persoalan manajemen perusahaan karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Peluang yang dapat dimanfaatkan dapat mendorong timbulnya tindakan meminimalkan pajak, baik berasal dari kekurangan perundang-undangan maupun dari sumber daya manusia itu sendiri (Suandy, 2011:2).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutanganya dengan mencari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan (Suandy, 2011:7). Menurut Sumarsan (2012:118) yang dimaksud dari penghindaran pajak adalah dimana Wajib Pajak tidak secara serta jelas melanggar Undang-undang (dalam hal ini undang-undang perpajakan) sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak ini merupakan tindakan yang legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dari peraturan perpajakan untuk menghindari beban perpajakan yang dapat mengurangi laba.

Semenjak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan secara eksplisit bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban bagi perseroan. Pasal 1 angka 3 UUPT menegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Azheri, 2012:146). Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR), yaitu dengan cara melaksanakan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada stakeholder (Wijayanti dkk, 2016). Aktivitas CSR adalah pengeluaran, begitu juga dengan pajak yang akan dikenakan atas aktivitas-aktivitas CSR yang mungkin saja harus dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Dilihat dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Dewi dan Noviari, 2017). Namun, untuk kondisi lain biaya yang tinggi tidak serta merta dapat mengurangi laba karena laba sendiri berasal dari pendapatan dikurangi seluruh beban operasional perusahaan. Laba dapat meningkat ketika pendapatan perusahaan meningkat lebih besar dari beban, yang mengakibatkan perusahaan akan sulit menghindari pajak yang ikut meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.

Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pendanaan, diukur dengan membandingkan total

utang dengan total ekuitas sendiri. Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang mengakibatkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasional mayoritas dengan modal sendiri. Sehingga perusahaan kadang memanfaatkan peluang ini untuk menghindari pajak dengan memilih untuk berutang. Namun hutang dalam jumlah besar juga tidak baik bagi perusahaan, karena dapat berakibat memburuknya kondisi keuangan perusahaan.

Tahun 2016 lalu pernah terjadi kasus yang sesuai dengan objek penelitian yaitu bocornya “Panama Papers” yang artinya “Dokumen Panama”. Dokumen tersebut dibuat oleh penyedia jasa asal Panama. Dokumen tersebut berisi data tentang transaksi keuangan para miliarder dan orang-orang terkenal di negeri ini. Sebagaimana yang dimuat dalam Republika.co.id Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan responnya atas bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers. Menurut Agus Santoso, Wakil ketua PPATK, pihaknya akan mulai menelusuri semua nama warga negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers. Nama individu ataupun perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal “The Panama Papers” ada 2.961. Agus menuturkan, Panama, British Virgin Islands, dan Cayman Islands adalah beberapa negeri “surga pajak” (*tax haven*) yang sering menjadi pilihan bagi warga negara kaya yang ingin menghindari pajak. PPATK juga telah menemukan cara-cara untuk transaksi

ke Panama. PPATK akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan untuk menelusuri lebih dalam potensi penghindaran pajak yang berkaitan dengan 2.961 nama tersebut. Terindikasi ada sejumlah nama berkebangsaan Indonesia ditemukan dari dokumen Panama Papers. Untuk menyebutkan beberapa di antaranya, yakni Laksamana Sukardi (mantan menteri BUMN), Anthony Salim (pengusaha), Mochtar Riady (pengusaha), Hashim Djojohadikusumo (pengusaha), Chairul Tanjung (pengusaha) dan James T Riady (pengusaha). Selain itu, beberapa perusahaan juga termasuk yakni, Pertamina, Astra International, Lippo, Agung Podomoro, Agung Sedayu, PT Ciputra Development TBK, Rabobank International, serta J-Co Donuts & Coffee. Tidak bisa dipastikan bahwa semua nama diduga melakukan upaya *illegal* penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara *illegal* yang ternyata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan properti dan real estate ternama ini dengan menyembunyikan kekayaan dengan tujuan menghindari pajak negara.

Fenomena yang lain yaitu kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp

300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi (Sumber: Kompas.com).

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perusahaan jasa property dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2016. Alasan peneliti memilih perusahaan ini yaitu sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal (2018) bahwa kegiatan transaksi disektor property yang sebagian besar *immobile* menunjukkan sektor property

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berpotensi cukup besar dalam meningkatkan *local taxing power* baik melalui instrumen pajak daerah maupun melalui mekanisme bagi hasil pajak. Pemerintah mengharapkan perusahaan ini tidak memanipulasi beban pajaknya mengingat potensi pajaknya yang cukup besar sebagai sumber penerimaan negara.

Sektor properti yang meliputi *real estate* dan konstruksi merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan diberbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah besar serta banyaknya pembangunan di sektor apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran, maka dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian pelaporan keuangan yang baik adalah yang bebas dari praktik penghindaran pajak, karena sangat dibutuhkan oleh investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modal di perusahaan properti dan *real estate*.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh penelitian sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam. Hasil penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *leverage* tidak berpengaruh.

Sedangkan penelitian Ayufa dan Nazar (2018), menyimpulkan secara parsial CSR dan *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan hasil penelitian Yunita (2018) menyimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara, hasil penelitian Christiawan (2016) serta Dewi dan Noviari (2017) menyimpulkan bahwa *leverage* dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel yang mendukungnya. Persoalan penghindaran pajak adalah persoalan yang rumit dan unik, disatu sisi diperbolehkan namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewi dan Noviari, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan jasa property dan *real estate*. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa properti dan real estate?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa properti dan real estate?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa properti dan realestate.
2. Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa properti dan realestate.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai variabel independen pada penelitian ini dan pengaruhnya terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.
 - b. Bagi pengguna laporan keuangan diharapkan dapat memberi pandangan sebelum melakukan keputusan investasi.